

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1. Pengertian Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

M. Mahsun, dkk. (2016:115) mengungkapkan bahwa manajemen sektor publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan organisasi sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana keuangan publik tersebut dapat dilihat dari hasil penyajian laporan keuangan. (M. Mahsun, dkk. 2016:115). Berikut beberapa definisi dari laporan keuangan:

M.Mahsun (2016:112) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal.”

Sedangkan menurut Kasmir (2016:7), laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”

Definisi laporan keuangan menurut Ihyanal Ulum (2011:4):

“Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan keuangan perusahaan yang disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.”

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:1):

“Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan.”

.Deddi Nordiawan. (2010:44) mengungkapkan bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan baik sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas penyajian laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dari beberaa definisi di atas, disimpulkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi berupa ringkasan keuangan perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi keuangan untuk kepentingan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2014:16) mengungkapkan bahwa pemerintah selaku subjek dari pengelolaan dana masyarakat harus mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dikarenakan adanya tuntutan yang semakin besar

terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Berikut penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut V.Wiratna Sujarweni (2017:2-3):

1. Dapat dipahami, artinya kualitas informasi dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pemakai
2. Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu.
3. Andal, artinya informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, sehingga dapat disajikan dengan wajar.
4. Dapat dibandingkan, artinya pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Penulis mengambil karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai indikator kualitas penyajian laporan keuangan.

2.1.1.3. Tujuan dan Fungsi Penyajian Laporan Keuangan

V. Wiratna Sujarweni (2017:1) mengungkapkan bahwa laporan keuangan perusahaan awalnya digunakan sebagai alat uji keluar masuknya keuangan perusahaan. Seiring perkembangan jaman, laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan yang kemudian akan digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan.

M. Mahsun (2016:115) mengungkapkan bahwa tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
Laporan keuangan memberikan jaminan pengelolaan sumber daya yang telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public, sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer public, dan

- memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya organisasi.
3. Perencanaan dan informasi otoritasi
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana dan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang.
 4. Kelangsungan organisasi
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu para pembaca menentukan keberlangsungan suatu organisasi atau unit kerja dalam menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang.
 5. Hubungan masyarakat
Laporan keuangan berfungsi sebagai alat dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 6. Sumber fakta dan gambaran
Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

2.1.2. Pengendalian Internal

2.1.2.1. Pengertian Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal menurut Mulyadi (2014: 163), adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.”

Hery (2016:159) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan atau prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/ undang-undang serta semua kebijakan manajemen telah dipenuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Menurut *Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commision* (COSO) dalam Azhar Susanto (2013:103) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Romney & Steinbart (2015: 216) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah:

“Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.”

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh setiap organisasi yang bersifat independen mencakup setiap pemangku jabatan di dalam organisasi atau instansi yang mempunyai keterkaitan dengan laporan keuangan, ketaatan akan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi suatu organisasi.

2.1.2.2. Unsur Pengendalian Internal

Hery (2016:93) menyebutkan bahwa pengendalian internal pemerintah terdiri dari unsur :

1. Lingkungan pengendalian, merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran resiko adalah identifikasi dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar bagaimana sebuah resiko harus dikelola
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan
4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka
5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Penulis mengambil unsur pengendalian internal sebagai indikator dari variabel pengendalian internal.

2.1.2.3. Tujuan dan Fungsi Pengendalian Internal

Hery (2016:159) mengungkapkan bahwa pengendalian internal biasanya akan mutlak diberlakukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi atau bisnis perusahaan. Dengan adanya penerapan pengendalian internal secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik, bukan hanya dari segi operasional saja tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih ter-monitor dengan baik.

Romney & Steinbart (2015:226) mengemukakan bahwa tujuan-tujuan pengendalian internal yaitu :

1. Mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak sah
2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar
3. Memberikan informasi yang akurat dan reliable
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah

2.1.3.1. Pengertian Akuntabilitas Keuangan Daerah

Deddi Nordiawan (2010:35) mengungkapkan bahwa definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Mempertanggungjawabkan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik .”

Definisi Akuntabilitas menurut Ihyaul Ulum (2010:31) adalah sebagai berikut:

“Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya.”

Abdul Halim (2012:20) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.”

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:385), menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah:

”Pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat.”

Ihya'ul Ulum (2010:41) membagi akuntabilitas menjadi dua kelompok, yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugas atau misi sebuah organisasi atau unit instansi kepada pihak yang memiliki kepentingan seperti *stakeholder* dan juga masyarakat. Dan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban atas penguasaan dan penggunaan dana-dana.

2.1.3.2. Jenis Akuntabilitas

Ihya'ul Ulum (2010:41) mengemukakan ada dua jenis akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan.
Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban atas penguasaan dan penggunaannya atas dana-dana sesuai peruntukan.
2. Akuntabilitas Kinerja.
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

2.1.3.3. Komponen Akuntabilitas

Ihya'ul Ulum (2010:41) membagi menjadi tiga komponen akuntabilitas keuangan yang dihasilkan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan, diantaranya :

1. Integritas Keuangan.
Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang

sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.

2. Pengungkapan.

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Laporan keuangan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

Penulis mengambil komponen akuntabilitas keuangan sebagai indikator dari variabel akuntabilitas keuangan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), telah mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Akuntabilitas keuangan daerah ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah yang akuntabel mencerminkan tertib pengelolaan keuangan, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. (Adhi dan Suhardjo, 2013). Untuk mendukung akuntabilitas keuangan daerah juga perlu didukung oleh pengendalian internal sehingga seluruh operasional perusahaan dapat berjalan

dengan baik. Pengendalian internal juga dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. (Hery, 2016:159)

2.3.1. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Menurut M. Mahsun, dkk (2016:115) menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

M. Mahsun, dkk. (2016:115) juga mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan jika dilihat dari sisi pemakai eksternal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka dengan penyajian informasi yang baik maka akan menciptakan akuntabilitas keuangan yang baik “

Penelitian yang dilakukan oleh F. Hariz (2017) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Jadi, semakin baik berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas keuangan daerah akan semakin baik. Nurlaili (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, hasilnya yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Maria Magdalena (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, akseibilitas keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dan Salomi (2015) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Daerah

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Pengendalian internal juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik yang mampu memuat informasi yang transparan dan akuntabel.

Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010:27) adalah sebagai berikut:

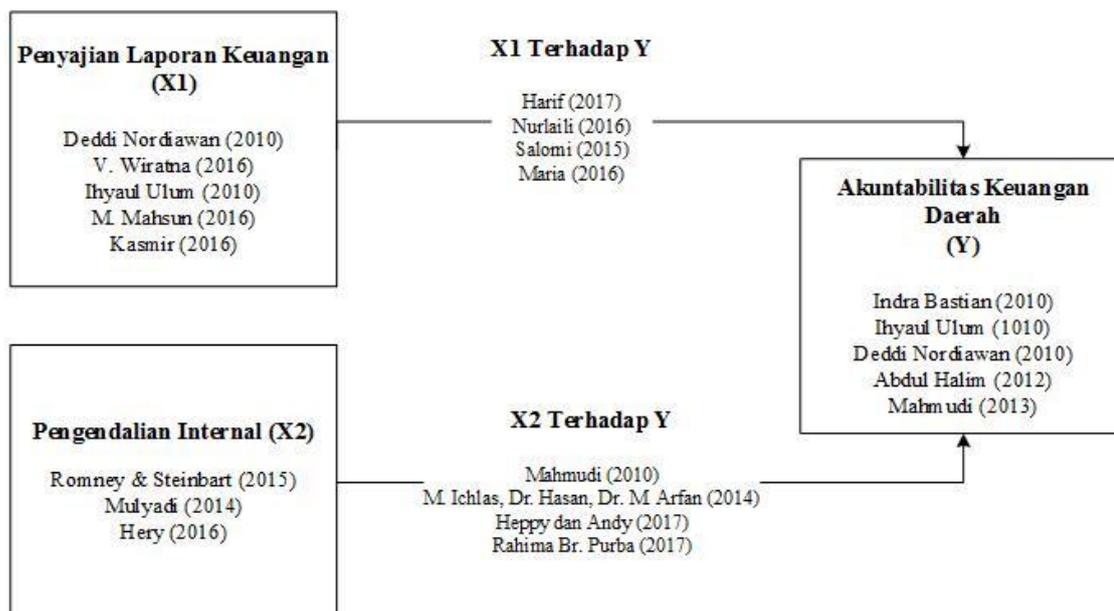
“... Akuntabilitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Heppy dan Andy (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan memiliki hasil yang berpengaruh secara signifikan dan menyatakan bahwa

pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, yang berarti semakin sedikit temuan pengendalian internal yang didapat maka akuntabilitasnya akan semakin baik, artinya semakin baik pengendalian internal akan membuat akuntabilitas pemerintah daerah semakin baik juga.

M. Ichlas, Dr. Hasan, Dr. M. Arfan (2014) meneliti mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah Kota Banda Aceh, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tetapi, dari penelitian yang dilakukan oleh Rahima Purba (2017) mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar menghasilkan bahwa aktivitas pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pokok permasalahan yang akan di uji kebenarannya (Sugiyono, 2018:63). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan teori-teori yang mendukung maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah

H₂ : Pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah